

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Negara ini merupakan salah satu untuk mengatur kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Dan tujuan Negara ini petunjuk untuk mengatur dan mempertahankan alat perlengkapan Negara dalam mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari masing-masing Negara di pengaruhi dimana tempat, awal bentuknya, dan di pengaruhi dari yang berkuasa Negara yang bersangkutan (Suharto, 2008). Selain itu, tujuan negara juga diungkapkan oleh Wicaksono (2006), yaitu menciptakan keadaan agar masyarakat bisa mencapai keinginannya secara maksimal.

Indonesia adalah suatu negara yang berkembang di dunia, dalam hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor Indonesia juga masih kurang dalam sumber daya manusia, salah satunya masyarakat. Beberapa hal yang di hadapi oleh masyarakat Indonesia masih juga belum baik dalam segi sosial maupun politik, yaitu kemiskinan itu sendiri merupakan masalah yang sudah lamadihadapi oleh di Indonesia pertama pada tahun 2014-2015, terjadi kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan masih kurang, produktivitas lapangan kerja sedikit, tingkat upah sangat kurang, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan peluang kerja kurang, hingga politik yang belum stabil. Menurut data kemiskinan pada tahun 2017, beberapa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2016 hampir mencapai 28,51 juta orang di sekitar 11,13% (BPS, 2016).

Menurut data kemiskinan Provinsi NTT pada tahun 2020, menunjukkan jumlah penduduk yaitu 6,326 juta jiwa, dengan jumlah penduduk miskin yaitu 1.173,530 ribu orang jumlah [penduduk miskin](#) di NTT pada Maret 2021 sebesar 1169,3 ribu penduduk, turun 4,22 ribu penduduk (0,36%) dari September 2020. Kecamatan Botin Leobele memiliki jumlah penduduk yakni 4,978 jiwa. Khususnya di Desa Kereana jumlah penduduk miskin mencapai 638 jiwa dari jumlah penduduk.

Pada tahun 2020 negara Indonesia terkena musibah yang sangat berbahaya yaitu Covid-19 menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Kenaikan harga barang masyarakat akan berdampak secara berantai pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian banyak masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Sejarah awal lahirnya BLT pada tahun 2004 pemerintah Indonesia memastikan Covid-19 ini sangat berbahaya bagi Indonesia dan seluruh dunia yang semakin tajam pada tahun 2020. Dan sekarang pemerintah kembali melaksanakan program BLT melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020 (Inpres 3/2020) tanggal 29 Agustus 2020 dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran (RTS) Program Bantuan Langsung Tunai tak bersyarat yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020 yang ditunjukkan kepada masyarakat bagi yang terkena *COVID-19*. Lalu pemerintah membuat suatu kebijakan program BLT ini dalam upaya membantu masyarakat miskin yang terdampak dari *COVID-19* dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat

selama pandemi besaran yang yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp 600.000-, selama 3 bulan pertama dan bulan selanjutnya sebesar Rp 300.000- selama lima bulan.

Dalam program BLT ini adalah ide yang lahir dari Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla usai memenangkan pemilu 2004 bersama Presiden SBY, Eksekutif, mengacu pada perintah Presiden nomor 12 tahun 2005 menggerakkan Program BLT tanpa syarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006. BLT adalah penjangkaran pengamanan sosial (PPS) dalam rangka meminimalisir dampak *COVID-19* bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ini juga, pemerintah memberi bantuan beras bagi masyarakat miskin sebagaimana tertuang dalam kebijakan stabilitas pangan yang di keluarkan pemerintah.

Program BLT merupakan bentuk program BLT yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai dampak *COVID-19*. Selain itu juga mendapatkan bantuan komoditas pangan berupa beras dan telur, BLT ini tetap di dampingi oleh program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan, yakni beras untuk rakyat miskin (raskin).

Kementerian dalam negeri, kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, dan kementerian keuangan telah menetapkan kebijakan BLT dalam rangka penanganan covid-19 bagi masyarakat desa yang dananya bersumber dari dana desa. Kementerian keuangan melalui direktorat jenderal perimbangan keuangan telah menetapkan PMK 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa dimana

terjadi perubahan prioritas penggunaan dana desa yang sebelumnya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya menjadi pemberian BLT desa.

Tujuan BLT dimasa covid-19 besaran adalah untuk membantu keluarga miskin atau tidak mampu di desa dan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi covid-19. Penerima BLT berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, dan kartu prakerja. Hal ini dilakukan agar terjadi pemerataan bantuan bagi masyarakat sehingga BLT yang diberikan pemerintah menjadi tepat sasaran.

Di NTT penerima BLT sebanyak 12,8 juta KK. Sedangkan di kabupaten malaka jumlah penduduk yang menerima sebanyak 21.688 KK, Khususnya di Desa Kereana terdapat 196 KK penerima BLT dari 608 KK.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa program BLT Di Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka, tidak tepat sasaran, karena dalam diadakan BLT ini tidak efisien. Selain itu Implementasi Program BLT di Desa Kereana tidak optimal, karena data yang di pakai tidak di lakukan revisi atau di verifikasi terlebih dahulu. Penyampaian BLT ini dibutuhkan data yang valid, siapa dan dimana RTS yang pantas menerima BLT tersebut yang berpenduduk tetap.

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka penelitian akan menerapkan karya ilmiah yang terjadi acuan dalam penelitian ini antaranya yaitu :

Penelitian terdahulu dari Amrida Ningci Siregar yang berjudul Implementasi

Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara Pada Tahun 2020, membahas tentang program bantuan sosial khusus dalam menghadapi pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak terkonfirmasi kasus covid-19 pertama di tanah air pada tanggal 2 maret tahun 2020 hingga memasuki akhir tahun 2020 kasus covid-19 semakin meningkat dan sudah memakan korban jiwa, dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda indonesia memberikan dampak yang cukup besar di masyarakat dalam berbagai bidang salah satunya di sektor ekonomi. Dampak sosial dan ekonomi di masa pandemi covid-19 mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan adanya pembatasan ekonomi secara makro yang menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dan berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Implementasi dari Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara Tahun 2020.

Hasil dari penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yakni sama-sama membahas tentang Program Bantuan Lansung Tunai, perbedaannya yaitu pada penelitian Amrida Ningci Siregar lebih menfokuskan Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat miskin terkena dampak covid-19, sedangkan penelitian saya ini menfokuskan pada sasaran dari Bantuan Langsung Tunai terhadap

masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan ekonomi rendah.

Shofa Navillah yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Oleh Kantor Desa BI-IH, Kecamatan Karang Intan Terhadap Warga Yang Berdampak Covid-19. Membahas tentang program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah tersebut senantiasa diarahkan dan ditunjukkan pada upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut mengingat bahwa banyaknya penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Seperti yang kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Pandemi COVID-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan program BLT terhadap warga terdampak COVID-19. Hasil dari penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yakni sama-sama membahas tentang Program Bantuan Langsung Tunai, perbedaannya yaitu pada penelitian Shofa Navillah lebih menfokuskan pada warga yang terdampak covid-19, sedangkan penelitian saya ini menfokuskan pada sasaran dari Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan ekonomi rendah.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA KEREANA, KECAMATAN BOTIN**

LEOBELE, KABUPATEN MALAKA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah *“Bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka?”*

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis
 1. Untuk menambah wawasan berpikir penulis, dan pengalaman penulis sendiri tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
 2. Memberikan informasi yang berarti tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

b. Manfaat Teoritis

1. Dapat menjadi masukan yang berarti bagi peran masyarakat tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka.
2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan terutama bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada lokasi yang berbeda.